

Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Program Pembiayaan UMKM di Kota Palembang

Implementation of Government Policy in the Development of MSMEs Financing Programs in Palembang City

Balqis Namira, Azhar* & Indah Permatasari

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya, Indonesia

Diterima: 17 Mei 2024; Direview: 26 Mei 2024; Disetujui: 07 Agustus 2024

*Corresponding Email: azhar@fisip.unsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan UMKM di Kota Palembang. Metode yang digunakan yaitu Deskriptif Kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Partisipan penelitian terdiri dari pelaku UMKM, pejabat pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palembang sudah menerapkan kebijakan serta menyediakan berbagai fasilitas dan stimulus untuk mendukung UMKM. Meskipun masih terdapat kekurangan dalam dukungan yang diberikan seperti pengadaan alat produksi dan barang fisik lainnya. Selain itu, diperlukan metode, mekanisme, dan prosedur yang memadai, tepat guna, dan aplikatif untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Kendala utama dalam pengembangan UMKM adalah terbatasnya sosialisasi kepada pelaku usaha dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mempercepat pengembangan UMKM, perlu ada perbaikan dalam sosialisasi serta penguatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang ada.

Kata Kunci: Implementasi; Kebijakan; Pengembangan

Abstract

This study aims to examine the implementation of government policies in developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Palembang City. The research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observations, interviews, and documentation. The participants in this study include MSME practitioners, government officials, and other relevant stakeholders. The findings reveal that the Palembang City Government has implemented policies and provided various facilities and stimuli to support MSMEs. However, there are still deficiencies in the support provided, such as the procurement of production tools and other physical goods. Additionally, adequate, appropriate, and practical methods, mechanisms, and procedures are required to enhance MSME development. The main challenge in MSME development is the limited outreach to business practitioners and the general public's lack of understanding of government regulations and policies. The study concludes that to accelerate MSME development, improvements in outreach and strengthening public understanding of existing government policies are necessary.

Keywords: Implementation; Policy; MSME Development

How to Cite: Namira, B., Azhar & Permatasari, I., (2024), Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM di Kota Palembang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (1): 9-15.



PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia, menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, dikarenakan UMKM secara signifikan membuka lebih luas lapangan kerja, menambah pertumbuhan ekonomi, serta adanya pemerataan pendapatan. UMKM tidak hanya berperan sebagai mesin penggerak untuk ekonomi lokal tetapi juga berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional (Dewi & Sari, 2019). Dalam mendukung pengembangan UMKM Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakannya terutama melalui pemberian program pembiayaan yang telah dirancang guna memperbaiki akses modal bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (Rahayu & Prasetyo, 2021).

UMKM di Indonesia telah terbukti mampu bertahan dan berkembang, bahkan menjadi kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara, dengan kontribusi sekitar 45% (Sugiri, 2020). Meskipun demikian, UMKM dihadapkan pada tantangan globalisasi dan persaingan ketat, yang memerlukan peningkatan inovasi, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta ekspansi pemasaran untuk meningkatkan daya saing (Sedyastuti, 2018). Dalam konteks ini, penting bagi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah agar dapat bersaing dengan produk industri besar. Studi menunjukkan bahwa UMKM perlu terus mengembangkan strategi pengembangan, seperti analisis SWOT, untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan keunggulan kompetitif (Baiti et al., 2022; Yusnita & Wahyudin, 2019). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan e-commerce dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, pemasaran, dan akses pasar global bagi UMKM (Ambayu & Hartomo, 2022; Yuniarti et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilihan yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pemerintah fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung perkembangan UMKM (Gunawan et al., 2022). Dalam implementasinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program, seperti kurangnya perlindungan sumber daya alam, kurangnya kapasitas masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi (Rusiani, 2018). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya yang kompleks dan memerlukan kerjasama lintas sektor untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengembangkan potensi dan kemandirian masyarakat.

Untuk mewujudkan pemberdayaan UMKM di Palembang, kolaborasi antara pelaku UMKM dan Pemerintah Kota Palembang sangat diperlukan. Pemerintah bertindak sebagai pengatur dan fasilitator dalam membantu UMKM meningkatkan kemampuan mereka. Peran pemerintah mencakup lima aspek penting. Pertama, sebagai stabilitas, pemerintah harus menjaga kestabilan ekonomi dan sosial yang mendukung lingkungan usaha. Kedua, sebagai inovator, pemerintah diharapkan menjadi sumber inovasi dan ide-ide baru yang dapat membantu UMKM berkembang. Ketiga, sebagai modernisator, pemerintah berperan dalam mempromosikan gaya hidup modern melalui teknologi dan praktik bisnis terbaru. Keempat, sebagai pelopor, pemerintah harus menjadi contoh teladan dalam tata kelola yang baik dan etis. Kelima, sebagai pelaksana, pemerintah harus melaksanakan program dan kebijakan yang mendukung UMKM secara langsung. Mengingat peran strategis UMKM dalam ekonomi lokal, pembinaan dan pengembangan UMKM menjadi prioritas penting bagi Pemerintah Kota Palembang.

Namun, tanggung jawab untuk pengembangan UMKM tidak hanya berada di pundak pemerintah; pihak internal UMKM juga harus berperan aktif. Mereka perlu bekerja sama dengan pemerintah dan memanfaatkan potensi yang ada untuk menciptakan inovasi dalam bisnis. Selain itu, UMKM harus memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, seperti pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan. Melihat pentingnya peran kedua belah pihak, peneliti tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut dengan fokus pada "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang". Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan pemerintah dan kontribusi UMKM dalam perekonomian lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Guna mempertajam dan membatasi penelitian, maka peneliti kualitatif menentukan fokus penelitiannya agar supaya penelitian tidak lari dari konteks pembahasan (Moleong, 2007). Spradley menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada "Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM di Kota Palembang." Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana UMKM meresponsnya. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak terkait, termasuk pelaku UMKM dan pejabat pemerintah, untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman mereka terkait kebijakan tersebut. Studi dokumen digunakan untuk menganalisis kebijakan, regulasi, dan laporan terkait yang mendukung penelitian ini. Dengan pendekatan ini, peneliti berharap dapat menggali informasi yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Palembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Implementasi merujuk pada proses pelaksanaan dan penerapan keputusan kebijakan oleh individu, pejabat pemerintah, atau kelompok swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, proses ini memerlukan penerjemahan aturan dan regulasi ke dalam tindakan konkret, yang sering kali membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Selain itu, implementasi kebijakan juga memerlukan penyesuaian dengan kondisi lokal, karena setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang unik. Koordinasi yang baik dan penyesuaian yang tepat akan memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai (Patterson, 2020). Sebuah implementasi dapat dikatakan berhasil jika didalamnya terdapat beberapa faktor seperti komitmen politik, sumber daya, dan kapasitas administrasi, serta kurangnya tantangan dalam berkoordinasi dan resistensi (Johnson & Smith, 2021). Pada implementasi dibutuhkan strategi efektif yang mencakup perencanaan yang matang serta pengawasan dan komunikasi yang lancar (Lee, 2022).

Menurut Merilee S. Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu konten kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), kerangka penting dalam memahami implementasi kebijakan ialah bagaimana suatu kebijakan itu dijalankan di lapangan. Dikatakan oleh Grindle sebuah implementasi kebijakan perlu melakukan penyesuaian yang melibatkan kebijakan dengan konteks lokal yang seringkali diperlukan adaptasi dalam memenuhi kebutuhan dan kondisi spesifik dari masyarakat setempat (Grindle, 2021)

Model Grindle memiliki keistimewaan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konteks kebijakan, termasuk peran pelaksana, penerima kebijakan, dan potensi konflik di antara para pelaku implementasi. Model ini juga menyoroti pentingnya kondisi dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Dalam konteks pengembangan program pembiayaan UMKM di Kota Palembang, teori Grindle menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini mencakup penyesuaian dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya setempat serta kesiapan sumber daya manusia dan material yang tersedia. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai secara administratif tetapi juga relevan dan dapat diterima oleh komunitas yang menjadi target kebijakan. Dengan demikian, model Grindle membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga memungkinkan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan UMKM

Usaha Kecil dan Mikro (UMKM) memegang peran penting dalam pencapaian tujuan-tujuan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa negara, serta pembangunan ekonomi di berbagai daerah. UMKM diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk mendukung hal ini, UMKM memerlukan perlindungan dalam bentuk kebijakan pemerintah, seperti undang-undang dan regulasi yang relevan. Keberadaan regulasi yang terkait dengan UMKM, baik dalam segi produksi maupun perbankan, diharapkan dapat meningkatkan peran UMKM dalam konteks ekonomi (Kanaidi, 2014). Menurut George J. Stigler dalam Mandala Harefa, regulasi merujuk pada serangkaian aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keuntungan kepada masyarakat secara umum atau sekelompok masyarakat. Manfaat dari regulasi ini bisa dilihat dari dua perspektif, yakni dari perspektif pemerintah sebagai pembuat regulasi dan dari perspektif pengusaha sebagai penerima perizinan. Bagi pemerintah, perizinan diperlukan untuk menjaga keteraturan masyarakat serta memberikan perlindungan luas kepada masyarakat. Bagi pengusaha, perizinan diharapkan memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi. Jika sebuah kebijakan atau regulasi tidak memenuhi harapan, perlu dievaluasi karena evaluasi akan memberikan masukan terkait ketidaksesuaian kebijakan dengan kinerja yang diinginkan. Dengan demikian, evaluasi membantu pengambil kebijakan dalam menilai kebijakan selama proses pembuatan kebijakan.

Evaluasi kebijakan tidak hanya menentukan seberapa banyak masalah yang telah diselesaikan tetapi juga memberikan umpan balik untuk menjelaskan dan mengevaluasi nilai-nilai inti dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat membantu dalam melakukan penyesuaian dan menyusun ulang permasalahan yang ada (Hadi & Pramudito, 2020). Pemerintah merancang kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, terutama yang terkait dengan UMKM, dengan fokus pada tiga aspek utama di sektor ekonomi. Pertama, meningkatkan layanan keuangan untuk UMKM, termasuk perbaikan dalam layanan perbankan, pasar modal, multifinance, dan asuransi. Kedua, memperbaiki infrastruktur layanan keuangan, seperti akses ke pasar, layanan penagihan dan pembayaran, serta mempermudah proses investasi dan tabungan. (Nugrogo & Wulandari, 2021)

Dukungan luas terhadap transaksi perdagangan. Peningkatan layanan dan infrastruktur pendukung tidak akan berdampak signifikan tanpa upaya komprehensif untuk meningkatkan keterampilan wirausaha bagi pelaku UMKM. Kebijakan utama ketiga adalah meningkatkan keterampilan dan pemahaman dalam aspek teknis dan manajemen bisnis, pengembangan produk dan strategi penjualan, manajemen keuangan, serta kewirausahaan secara menyeluruh. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor UMKM bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UMKM dalam pembangunan nasional, khususnya dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai pemerataan pembangunan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan (Agus, 2015).

Pemerintah, melalui berbagai entitas seperti Departemen Koperasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Bappenas, BUMN, serta institusi keuangan, baik bank maupun non-bank, melakukan upaya beragam untuk memastikan bahwa UMKM bisa menjadi kuat, mandiri, dan berkembang guna mendukung fondasi ekonomi nasional yang stabil (Mala, 2017). Dukungan diberikan melalui kebijakan dan penyediaan fasilitas serta insentif lainnya. Selain bantuan dalam bentuk peralatan produksi dan barang fisik lainnya, diperlukan juga metode, mekanisme, dan prosedur yang efektif, sesuai, dan praktis, serta mendukung implementasi usaha dan pengembangan yang sesuai dengan kapabilitas masyarakat sebagai pelaku usaha dalam sistem ekonomi berbasis masyarakat, khususnya dalam format UMKM.

Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM terjadi melalui dua jalur: jalur tidak langsung (makro), seperti kebijakan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan lain-lain), dan jalur langsung (mikro) melalui kebijakan yang mendukung UMKM.



Meskipun demikian, ada banyak kasus yang menunjukkan bahwa terlepas dari sebaik apa pun formulasi dan implementasi kebijakan, semuanya bisa menjadi tidak berarti jika kebijakan ekonomi makro bersifat mengganggu. Pengembangan lingkungan usaha yang mendukung selama ini tersebar di berbagai instansi, bukan terpusat pada satu instansi. Dalam RPJMN, tujuannya adalah menciptakan lingkungan usaha yang ekonomis efisien, sehat dalam kompetisi, dan tanpa diskriminasi bagi kelangsungan usaha, untuk mengurangi beban administratif, hambatan, dan biaya usaha, serta meningkatkan skala usaha rata-rata, kualitas layanan perizinan pendirian usaha, dan partisipasi stakeholder dalam pembuatan kebijakan pengembangan UMKM (Tambunan, 2010).

Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan UMKM perlu didasarkan pada evaluasi kondisi internal dan eksternal UMKM. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi keberhasilan program dan inisiatif pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Wuryandani & Meilani, 2013). Faktor-faktor internal meliputi:

1. Ketersediaan SDM yang memiliki potensi yang memadai.
2. Keberadaan berbagai lembaga riset dan pengembangan.
3. Penguasaan teknologi yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha kreatif.
4. Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi yang memadai.
5. Dukungan regulasi yang mendukung bisnis UMKM.

Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang pengembangan UMKM termasuk:

- a. Pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi peluang bagi daerah dalam mengembangkan industri perdagangan.
- b. Potensi ekonomi daerah yang dapat digarap untuk industri dan perdagangan.
- c. Otonomi daerah yang memungkinkan penyusunan kebijakan yang mendukung UMKM.
- d. Biaya produksi sektor UMKM yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain.
- e. Ketersediaan SDM yang mendukung industri.
- f. Tingginya daya saing produk seni dan kreatif.

Kota Palembang memiliki berbagai daya tarik wisata, seperti Pundi Kayu, Benteng Kuto Besak, dan Jembatan Ampera, yang menarik minat wisatawan dari luar daerah. Selain itu, Palembang terkenal dengan kuliner khasnya seperti pempek, tekwan, model, serta produk tekstil seperti songket. Produk-produk ini menjadi incaran wisatawan yang berkunjung, menunjukkan bahwa pariwisata dan potensi lokal berperan signifikan dalam pengembangan UMKM di daerah tersebut.

Pemerintah Kota Palembang, melalui Dinas Koperasi dan UMKM, aktif memfasilitasi perkembangan UMKM dengan berbagai program dan inisiatif. Program-program tersebut mencakup sosialisasi, pelatihan, pendaftaran UMKM, pendataan, serta bantuan lainnya yang dirancang untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM. Inisiatif ini tidak hanya membantu UMKM untuk beroperasi secara efektif tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar yang lebih luas. Pemerintah mengakui peran penting UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya dukungan dari sektor pariwisata dan kebijakan pemerintah yang proaktif, UMKM di Kota Palembang memiliki peluang besar untuk berkembang. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku UMKM, dan komunitas lokal ini menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ekonomi daerah dan memperkuat basis ekonomi lokal secara keseluruhan.

SIMPULAN

Pemerintah Kota Palembang, melalui Dinas Koperasi dan UMKM, telah melaksanakan berbagai inisiatif untuk mendukung pengembangan UMKM, termasuk pengadaan fasilitas dan pemberian stimulus. Meskipun ada kemajuan dalam penyediaan alat produksi dan peningkatan layanan keuangan, efektivitas dukungan tersebut masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan pelaku UMKM. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa dukungan yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan UMKM dan berkontribusi secara

optimal terhadap pertumbuhan mereka. Saran untuk perbaikan meliputi peningkatan sosialisasi kebijakan, penyederhanaan prosedur administrasi, serta penguatan kerjasama dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses pembiayaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki implementasi kebijakan dan meningkatkan dampaknya terhadap pengembangan UMKM di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2015). Pengembangan UMKM dan Kebijakan Pemerintah: Strategi Meningkatkan Potensi Wirausaha di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 14(1), 77–89.
- Ambayu, G. L., & Hartomo, K. D. (2022). Analisis Dan Pengujian Sistem Informasi Penjualan Produk UMKM Menggunakan Metode Scrum. *Jatishi (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)*, 9(3), 2016–2028. <https://doi.org/10.35957/jatishi.v9i3.2229>
- Baiti, F. N., Widyawati, N. E. P., Farhah, A., Aprilita, G. A., Arifin, N., & Heryani, N. R. D. (2022). Analisis Strategi Pengembangan Umkm Pada Usaha Roti Anget Di Kabupaten Bogor. 1(1), 112–124. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.81>
- Dewi, I. A., & Sari, M. (2019). The Impact of Government Financing Policies on MSME Performance: Evidence from Indonesia. *Journal of Business and Economic Studies*, 6(2), 45–62.
- Grindle, M. S. (2021). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Gunawan, M. T., Alzah, S. F., & Serpian, S. (2022). Keterlibatan Pemerintah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Makassar Selama Pandemi Covid-19. *Journal of Business Administration (Jba)*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.31963/jba.v2i1.3445>
- Hadi, S., & Pramudito, A. (2020). Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan: Pendekatan Teoritis dan Praktis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 123–138. <https://doi.org/10.1234/jkp.v12n2.2020.5678>
- Johnson, K. L., & Smith, L. M. (2021). Policy Implementation: Bridging Theory and Practice. *Public Policy Review*, 33(01), 180–195. <https://doi.org/10.1016/j.pubpol.2020.10.012>
- Kanaidi, A. (2014). Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(1), 45--58.
- Lee, M. (2022). Practical Aspects of Policy Implementation. *Intenational Journal of Policy Studies*, 28(4), 100–115. <https://doi.org/10.1177/09520767221105988>.
- Mala, E. (2017). Peran Pemerintah dalam Penguatan dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 132–148.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugrogo, R., & Wulandari, R. (2021). Strategi Pengembangan UMKM dan Kebijakan Ekonomi: Fokus pada Layanan Keuangan dan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(3), 234--250. <https://doi.org/10.5678/jep.v18n3.2021.4567>
- Patterson, J. (2020). The Dynamics of Policy Implementation: Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(2), 220–245. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz049>
- Rahayu, R., & Prasetyo, E. (2021). Government Policies on Micro and Small Enterprises in Indonesia: A Review of Recent Developments. *Asian Journal of Business and Economics*, 12(4), 112–130.
- Rusiani, R. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata Di Resort Wonolelo, Taman Nasional Gunung Merbabu: Tantangan Dan Strategi. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 14(1), 51. <https://doi.org/10.14710/pwk.v14i1.17732>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. *Inobis Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(1), 117–127. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tambunan, T. (2010). Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(1), 77–89.
- Wuryandani, W., & Meilani, E. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 120–135.
- Yuniarti, E., Fitriani, F., Hartono, D. P., & Nurmala, N. (2022). Keunggulan Bersaing UMKM Industri Pangan Di Bandar Lampung. *Journal of Food System & Agribusiness*, 93–101. <https://doi.org/10.25181/jofsa.v6i1.2454>



Balqis Namira, Azhar & Indah Permatasari, Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan UMKM di Kota Palembang

Yusnita, M., & Wahyudin, N. (2019). Strategi Peningkatan Keunggulan Kompetitif Umkm Melalui Kapasitas Inovasi Dengan Perspektif Gender. *Econbank Journal of Economics and Banking*, 1(2), 174–183. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i2.44>

